



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip yang tertuang dalam jadwal retensi arsip;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Nomor B-PK.02.09/92/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu ditetapkan jadwal retensi arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
 7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 241);
 8. Peraturan Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
7. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingat JRA adalah daftar yang berisi paling kurang jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
9. Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan Arsip Aktif di unit pengolah.
10. Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan Arsip Inaktif di unit kearsipan.
11. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan Arsip statis kepada Lembaga Kearsipan.
12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusutan Arsip yang berkaitan dengan JRA Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan Daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; dan
- c. menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Pasal 4

(1) JRA Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. umum:
 1. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 2. perlengkapan;
 3. pengadaan;
 4. perpustakaan;
 5. kearsipan;
 6. persandian;
 7. perencanaan pembangunan;
 8. organisasi dan tata laksana; dan
 9. penelitian, pengkajian dan pengembangan;

- b. pemerintahan:
 - 1. otonomi daerah;
 - 2. pemerintahan umum; dan
 - 3. hukum;
- c. politik:
 - 1. kesatuan bangsa dan politik; dan
 - 2. pemilu;
- d. keamanan dan ketertiban:
 - 1. satuan polisi pamong praja; dan
 - 2. penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan;
- e. kesejahteraan rakyat:
 - 1. pembangunan daerah tertinggal;
 - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. pendidikan;
 - 4. keolahragaan;
 - 5. kepemudaan;
 - 6. kebudayaan;
 - 7. kesehatan;
 - 8. agama dan kepercayaan;
 - 9. sosial;
 - 10. pemberdayaan masyarakat desa;
 - 11. pertamanan dan pemakaman;
 - 12. kependudukan dan catatan sipil;
 - 13. keluarga berencana; dan
 - 14. hubungan masyarakat;
- f. perekonomian:
 - 1. ketahanan pangan;
 - 2. perdagangan;
 - 3. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - 4. kehutanan;
 - 5. kelautan dan perikanan;
 - 6. pertanian;
 - 7. peternakan;
 - 8. perkebunan;
 - 9. perindustrian;
 - 10. energi dan sumber daya mineral;
 - 11. perhubungan;
 - 12. komunikasi dan informatika;
 - 13. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 14. statistik;
 - 15. ketenagakerjaan;
 - 16. penanaman modal;
 - 17. pertanahan; dan
 - 18. transmigrasi;

- g. pekerjaan umum dan ketenagaan:
 - 1. pekerjaan umum;
 - 2. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - 3. tata ruang (tata kota); dan
 - 4. lingkungan hidup;
 - h. pengawasan:
 - 1. pengawasan internal;
 - i. kepegawaian:
 - 1. sumber daya manusia; dan
 - 2. pendidikan dan pelatihan;
 - j. keuangan:
 - 1. keuangan daerah.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis Arsip, Retensi Arsip dan keterangan.
- (3) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan untuk:
 - a. Retensi Aktif; dan
 - b. Retensi Inaktif.
- (2) Retensi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di Unit Pengolah.
- (3) Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Retensi Aktif dihitung sejak Arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.
- (2) Retensi Inaktif dihitung sejak Arsip selesai masa simpan aktifnya.

Pasal 7

- (1) JRA memuat rekomendasi terhadap Arsip berupa keterangan:
 - a. musnah;
 - b. dinilai kembali; dan
 - c. permanen.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;
 - b. keterangan dinilai kembali ditentukan pada Arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan; dan
 - c. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan.

Pasal 8

Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 September 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR 40.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

JADWAL RETENSI ARSIP

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1.	UMUM	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	A. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHAN			
	1. Telekomunikasi			
	2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Perjalanan Dinas DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3. Perjalanan Dinas Luar Negeri			
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Perjalanan Dinas DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	4. Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya			
	5. Rapat Pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	6. Penyediaan komsumsi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	7. Pengurusan Kendaraan Dinas			
	a. Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Pemeliharaan dan Perbaikan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
8.	Pemeliharaan Gedung, Taman, dan Peralatan Kantor			
	a. Pertamanan/ <i>Landscape</i>	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Penghijauan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Perbaikan Gedung	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Perbaikan Peralatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Perbaikan Rumah Dinas/Wisma	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. Kebersihan Gedung dan Taman	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
9.	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer			
	a. Perbaikan/Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Pemasangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
10.	Ketertiban dan Keamanan			
	a. Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Laporan Ketertiban dan Keamanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
11.	Administrasi Pengelolaan Parkir	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
12.	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
B. PERLENGKAPAN				
	1. Inventarisasi dan Penyimpanan	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data	3 Tahun	Musnah
	a. Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan			Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
2.	Pemeliharaan Peralatan Kantor	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data	3 Tahun	Musnah
a.	Data Hasil Pemeliharaan Kantor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor			
3.	Distribusi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertangungjawabkan	3 Tahun	Musnah
a.	Barang Habis Pakai			Musnah
b.	Barang Milik Daerah			Musnah
4.	Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang Dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk di dalamnya Proses Lelang Penghapusan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertangungjawabkan	7 Tahun	Musnah
5.	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
C.	PENGADAAN			
1.	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang / Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2.	Pengadaan Langsung, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	3. Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Swakelola, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: Database Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Database Kontrak, Database Pengadaan Barang/Jasa	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data	3 Tahun	Permanen
6.	Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan Hasil Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
D.	PERPUSTAKAAN	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
1.	Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
2.	Deposit Bahan Pustaka	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Terbitan Internasional dan Regional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Bibliografi dan Katalog	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	Koleksi Pustaka	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	a. Pembelian	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Hibah	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Hadiah			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Tukar Menukar	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Implementasi Undang-Undang KCKR	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Terbitan Internal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	g. Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	h. Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4.	Pengolahan Bahan Pustaka	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5.	Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
6.	Layanan Perpustakaan			
	a. Keanggotaan	1 Tahun	1 Tahun	
	b. Peminjaman	1 Tahun	1 Tahun	
	c. Pengembangan Gemar Baca	1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (<i>Upgrade</i>)	1 Tahun	
7.	Kerjasama Perpustakaan			
	a. MoU	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Perjanjian Kerjasama	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	c. Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerjasama Internasional	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	8. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan			
	a. Pengembangan Situs Web	1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (<i>Upgrade</i>)	1 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia	1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (<i>Upgrade</i>)	1 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (<i>Upgrade</i>)	3 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
9.	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 Tahun Setelah Data Dipperbarui	3 Tahun	Permanen
10.	Konservasi			
	a. Perawatan Bahan Perpustakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Perbaikan Bahan Perpustakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Penjilidan Bahan Perpustakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11.	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
12.	Transformasi Digital	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
13.	Kurasi Digital	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
14.	Pengembangan Perpustakaan			
	a. Perpustakaan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Perpustakaan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Perpustakaan Sekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Perpustakaan Perguruan Tinggi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
E.	KEARSIPAN			
	1. Kebijakan di Bidang Kearsipan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		3 Tahun	Permanen
		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru		
2.	Pembinaan Kearsipan			
	a. Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan Konsultasi Arsiparis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Penilaian Arsiparis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Database Arsiparis	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	f. Bimbingan Konsultasi Kearsipan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Database Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	i. Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana, dan Sarana Kearsipan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	j. Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k. Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
3.	Pengelolaan Arsip Dinamis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	c. Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	e. Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
4.	Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihhan Arsip Vital	2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban Selesai	3 Tahun	Permanen
5.	Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Istri Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga	2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban Selesai	3 Tahun	Permanen
6.	Penyusutan Arsip	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	a. Pemindahan Arsip, antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang Dipindahkan			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Pemusnahan Arsip, meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang Dimusnahkan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	c. Penyerahan Arsip Statis, meliputi: Pembentukan Panitia Penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Karsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
7.	Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan Alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
8.	Database Pengelolaan Arsip Dinamis <ol style="list-style-type: none"> Database Pengelolaan Arsip Aktif Database Pengelolaan Arsip Inaktif 	1 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	1 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	Permanen
9.	Pengelolaan Arsip Statis			Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Akuisisi, meliputi: Monitoring Fisik dan Daftar, Verifikasi terhadap Daftar Arsip, Menetapkan Status Arsip Statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan Arsip yang Diserahkan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	b. Penghargaan dan Imbalan			Permanen
	c. Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi Kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/Media Lain sesuai Perkembangan TI) dan Transkrip	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	d. Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: Penggumuman, Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	e. Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis, Guide	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	f. Preservasi Preventif, antara lain: Penyimpanan, Pengendalian Hama Terpadu, Reproduksi (Alih Media)	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah
	g. Preservasi Arsip	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	h. Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan Arsip, Penerbitan Naskah Sumber	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah
10.	Jasa Kearsipan, antara lain: Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah
11.	Pengelolaan SIKN dan JIKN	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF
	12. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana 13. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Digabung dan/atau dibubarkan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun
	14. Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Tahun	3 Tahun
15. Pengawasan Kearsipan	a. Pengawasan Kearsipan Internal b. Pengawasan Kearsipan Eksternal c. Sanksi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun
F. PERSANDIAN	1. Kebijakan di Bidang Persandian yang Dilakukan oleh Pemerintahan Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun
	2. Pengamanan Persandian	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun
	a. Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto b. Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto c. Materiil Sandi: Sistem dan Peralatan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun
	3. Pengkajian Persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun
	a. Perencanaan Pengkajian b. Administrasi Pengkajian c. Pelaksanaan d. Pelaporan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun
	4. Pembinaan dan Pengendalian Persandian	2 Tahun	3 Tahun
	a. Sumber Daya Manusia (SDM)		Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Jaring Komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	a. Perencanaan dan Administrasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Pelaksanaan Verifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Penyesuaian Sistem dan Testing	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	f. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
G. PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	a. Musrenbang Provinsi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Musrenbang Nasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d. Musrenbang Kecamatan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	e. Musrenbang Kelurahan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	f. Musrenbang Desa	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
2.	Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Rencana Anggaran Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Rencana Pembangunan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	f. Program Kerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Penetapan/Kontrak Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Laporan Berkala	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	i. Laporan Insidential	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	j. Evaluasi Program	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4.	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
6.	Aksi Strategis Daerah			
	a. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan Perangkat Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Sosialisasi dengan Perangkat Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Penerapan Perencanaan Aksi Strategi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
7.	Perencanaan Pendanaan Pembangunan			
	a. Pendanaan Nasional dan Hibah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Pendanaan Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Kerja Sama Pembangunan Nasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Surat Berharga Syariah Negara	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
H.	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA			
1.	Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah			
a.	Kabupaten/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pengubahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Pembubaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2.	Uraian Jabatan dan Tata Kerja			
a.	Analisa Jabatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Analisa Beban Kerja			
3.	Ketatalaksanaan			
a.	Proses Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Standar Pelayanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Standar Operasional Prosedur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Pelayanan Publik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4.	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional			
5.	Evaluasi Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnahn
6.	Koordinasi Penguatan Reformasi Birokrasi			
a.	Budaya Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnahn
b.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnahn
c.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnahn
I.	PENELITIAN, PENGAJIAN, DAN PENGEMBANGAN			
1.	Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	2. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4.	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6.	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a.	Data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Statistik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7.	Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
8.	Hak Atas Kekayaan Intelektual	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
9.	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
10.	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
II.	PEMERINTAHAN			
A.	OTONOMI DAERAH			
1.	Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga			
	a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Asosiasi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Otonomi Khusus Daerah Istimewa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6. Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)			
	a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kemampuan Penyele.nggaraan Otonomi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Kapasitas Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7. LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	B. PEMERINTAHAN UMUM			
	1. Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintahan Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
2.	Dekonsentrasi dan Kerja Sama <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah d. Fasilitasi Kecamatan e. Fasilitasi Pelayanan Umum Wilayah Administrasi dan Perbatasan 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Toponimi dan Data Wilayah b. Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara Batas Antar Daerah Wilayah c. Batas Antar Kelurahan Satu Kecamatan dan Batas Wilayah Antar Kelurahan Antar Kecamatan d. Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan e. Pemeliharaan Batas Wilayah 	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	C. HUKUM			
	1. Program Legislasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Diundangkan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	2. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain: Rancangan Peraturan Daerah			
	3. Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Keputusan/Ketetapan Gubernur b. Keputusan/Ketetapan Bupati c. Keputusan/Ketetapan Walikota d. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi e. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten f. Keputusan Sekretaris Daerah Kota g. Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah
	4. Instruksi/Surat Edaran a. Instruksi/Surat Edaran Provinsi b. Instruksi/Surat Edaran Kabupaten c. Instruksi/Surat Edaran Kota d. Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
	5. Surat Perintah a. Surat Perintah Gubernur b. Surat Perintah Bupati c. Surat Perintah Walikota d. Surat Perintah Setingkat Eselon II	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	6. Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk 7. Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja a. Dalam Negeri	2 Tahun 3 Tahun	3 Tahun	Permanen 2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak telah Dilaksanakan

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Luar Negeri	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak telah Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
8.	Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Peraturan yang Dijadikan Referensi	1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Permanen
9.	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
10.	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	2 Tahun Setelah Diperoleh Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
11.	Kasus/Sengketa Hukum	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
	a. Pidana Kasus/Sengketa Pidana, Baik Kejahatan maupun Pelanggaran		3 Tahun	
	b. Perdata Kasus/Sengketa Perdata		3 Tahun	
	c. Tata Usaha Negara	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Perburuan	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
	e. Arbitrase	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
	f. Sengketa Adat	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Permanen
	12. Perizinan	2 Tahun Setelah Izin Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	13. Hak Atas Kekayaan Intelektual	2 Tahun Setelah Hak Atas Kekayaan Intelektual Habis	3 Tahun	Permanen
	a. Hak Cipta	2 Tahun Setelah Hak Atas Kekayaan Intelektual Habis	3 Tahun	Permanen
	b. Hak Paten	2 Tahun Setelah Hak Atas Kekayaan Intelektual Habis	3 Tahun	Permanen
	c. Hak Desain Industri	2 Tahun Setelah Hak Atas Kekayaan Intelektual Habis	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Hak Rahasia Dagang	2 Tahun Setelah Hak Atas Kekayaan Intelektual Habis	3 Tahun	Permanen
	e. Hak Merk	2 Tahun Setelah Hak Atas Kekayaan Intelektual Habis	3 Tahun	Permanen
	f. Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang Ditolak	1 Tahun Setelah Ditolak Permohonan	1 Tahun	Musnah
III.	POLITIK			
	A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	1. Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			
	a. Ketahanan Ideologi Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Wawasan Kebangsaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Bela Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pembauran dan Kewarganegaraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Kewaspadaan Nasional			
	a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
4.	d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
4.	a. Ketahanan Seni b. Ketahanan Budaya c. Agama dan Kepercayaan d. Organisasi Kemasyarakatan e. Masalah Sosial Kemasyarakatan f. Fasilitasi g. Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen
5.	h. Laporan Hasil Kerja Sama Kegiatan Dengan Ormas/LNL i. Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi j. Fasilitasi Sengketa Ormas k. Fasilitasi Ormas	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
5.	l. Implementasi Kebijakan Politik	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
5.	a. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan b. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik c. Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang Memperoleh Kursi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
6.	d. Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi e. Pemerintah Daerah f. Database Parpol g. Pendidikan Budaya Politik	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
6.	Ketahanan Ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6.	a. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter c. Perilaku Perekonomian Masyarakat	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
B.	d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1. Kebijakan di Bidang Kepemiluan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
	2. Penutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Daftar Pendukuk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Daftar Pemilih Tambahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Partai Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	c. Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Penetapan Peserta Pemilu	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	4. Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Peta Daerah Pemilihan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Pencalonan Pemilu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Petunjuk Teknis Pencalonan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Surat Pencalonan Pendaftaran c. Daftar Bakal Calon d. Dokumen Persyaratan Masing-Masing Bakal Calon e. Dokumen Verifikasi Administrasi f. Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen
6.	Kampanye Pemilu	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah
	a. Keputusan KPU tentang Penetapan Jadwal Kampanye b. Nama Juru Kampanye/Pelaksana Kampanye c. Peringatan Terulis/Penghenitian Kegiatan Kampanye	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
7.	Dana Kampanye	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	a. Pedoman Audit Dana Kampanye b. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu c. Laporan Hasil Audit Dana Kampanye	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
8.	Penungutan dan Penghitungan Suara	2 Tahun	2 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen
	a. Keputusan KPU tentang Desain dan Spesifikasi Surat Suara b. Master Surat Suara c. Surat Suara yang Terpakai	2 Tahun 1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Ada Gugatan Hukum 1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Ada Gugatan Hukum	3 Tahun 1 Tahun	Musnah
	d. Surat Suara Tidak Terpakai (Rusak, Salah, dan Tidak Digunakan)	1 Tahun		
	e. Formulir Pemilu di Pemerintah Daerah	3 Tahun 2 Tahun		Permanen Permanen
9.	Penetapan Hasil Pemilu	2 Tahun		
10.	Perselisihan Hasil Pemilu	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen
11.	a. Surat-Surat Mengenai Perselisihan Hasil Pemilu b. Jawaban dan Kesimpulan Termohon c. Salinan Putusan Lembaga Peradilan d. Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun		

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
IV.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
A.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1.	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintahan Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a.	Tata Operasional Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3.	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Perlindungan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6.	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
B.	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN			
1.	Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian dan Pertolongan			
a.	Rencana dan Standardisasi dan Pengawakan dan Perbekalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Kurikulum dan Silabus, Evaluasi dan Monitoring	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Tenaga Pencarian Pertolongan, Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Permasyalahakatan Pencarian dan Pertolongan, Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Perencanaan dan Standardisasi, Penyelenggaraan Operasi SAR, Siaga dan Latihan, Tempat Latihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah (Kecuali Laporan)
f.	Registrasi BEACON	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	4. Potensi Pencarian dan Pertolongan 5. Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah
	a. Rencana Pendidikan dan Pelatihan b. Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan			
	c. Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Operasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7. Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	8. Operasi Komunikasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	a. Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR) b. Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR) c. Registrasi BEACON	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	9. Inventarisasi dan Pemeliharaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	10. Pengembangan Sistem Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11. Penyajian dan Layanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	12. Pelaporan dan Evaluasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah
V.	KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	A. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL			
	1. Kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Pembangunan Sumber Daya			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	<p>b. Data Perlindungan Perempuan c. Advokasi dan Fasilitasi d. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan</p> <p>e. Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender f. Analisis dan Penyajian Informasi Gender g. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Ibu</p> <p>4. Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum)</p> <p>a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak</p> <p>b. Data Perlindungan Anak</p> <p>c. Advokasi dan Fasilitasi d. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak</p> <p>e. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak</p> <p>5. Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Pengembangan Kota Layak Anak)</p> <p>a. Pemenuhan Hak Anak</p> <p>b. Data Klaster Hak Anak</p> <p>c. Data Tumbuh Kembang Anak</p> <p>d. Advokasi dan Fasilitasi</p>	<p>2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan</p> <p>1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun</p> <p>2 Tahun Setelah Data Diperbarui</p> <p>3 Tahun 3 Tahun Setelah Data Diperbarui</p> <p>2 Tahun 2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun 3 Tahun Setelah Data Diperbarui</p> <p>2 Tahun 2 Tahun</p> <p>2 Tahun Setelah Data Diperbarui</p>	<p>3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun</p> <p>1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen Musnah Permanen</p> <p>Permanen Musnah Musnah</p> <p>Permanen Musnah Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen Musnah Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen Musnah Permanen</p> <p>Permanen Musnah Permanen</p>

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF		
	e. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	f. Penyelenggaraan Parenting Pola Pengasuhan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
6.	Penghargaan Terkait Gender (Anugerah Parahita Ekapraya / APE)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
7.	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
8.	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
C.	PENDIDIKAN	3 Tahun		<i>a i f M</i>	
	1. Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru			
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal	3 Tahun			
	a. Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	2 Tahun	3 Tahun		
	b. Pelatihan Sosial	2 Tahun	3 Tahun		
	c. Peringatan Hari anak	2 Tahun	3 Tahun		
	d. <i>Block Grant</i>	2 Tahun	3 Tahun		
3.	Pendidikan Masyarakat	3 Tahun			
	a. Penyele.nggaraan Program	2 Tahun	3 Tahun		
	b. Penilaian dan Pemberian Bantuan Sosial	2 Tahun	3 Tahun		
	c. Pembinaan Program	2 Tahun	3 Tahun		
	d. Lomba/Pemberian Penghargaan	2 Tahun	3 Tahun		
	e. Pameran	2 Tahun	3 Tahun		
	f. Rapat Koordinasi	2 Tahun	3 Tahun		
	g. Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun		
	h. Sertifikasi dan Akreditasi	2 Tahun	3 Tahun		
4.	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	3 Tahun			
5.	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	3 Tahun			
	a. Kurikulum, Bahan Ajar	2 Tahun	3 Tahun		
	b. <i>Block Grant</i>	2 Tahun	3 Tahun		
	c. Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun		
	d. Lomba, Penghargaan, Penganugerahan	2 Tahun	3 Tahun		

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
6.	e. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) f. Bantuan Siswa Miskin Pendidikan Khusus/Layanan Khusus	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	a. Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran b. <i>Block Grant</i> c. Lomba, Festival d. Sosialisasi, Bimtek e. Pendataan f. Kelembagaan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah
7.	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik			
	a. Pendataan dan Pemetaan b. Uji Kompetensi Guru c. Sertifikasi Guru d. Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan e. Peningkatan Kesejahteraan Guru f. Sosialisasi, Bimtek g. <i>Block Grant</i>	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen
8.	Sekolah Menengah Atas			
	a. Kurikulum b. Bahan Ajar c. Pelatihan d. <i>Block Grant</i> e. Bimbingan Teknis/Sosialisasi f. Lomba, Sayembara, Festival g. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) h. Bantuan Siswa Miskin	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen
9.	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus			
	a. Bahan Ajar b. Perunjuk Teknis c. <i>Block Grant</i> d. Sosialisasi, Bimtek e. Lomba, Sayembara, Jambore, Festival	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	f. Kurikulum/Bahan Pembelajaran g. Alat Bantu Pembelajaran h. Pendataan i. Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusif)	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
10.	Pendidik dan Tenaga Pendidik a. Pendataan dan Pemetaan b. Uji Kompetensi Guru c. Sertifikasi Guru d. Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah e. Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan f. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik g. Block Grant h. Bimbingan Teknis/Sosialisasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanent Musnah Permanent Musnah
11.	Penilaian Pendidikan a. Penilaian Akademik b. Penilaian Non Akademik c. Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanent Permanent Permanent
12.	Data dan Statistik Pendidikan a. Data Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanent Permanent
13.	Prasarana dan Sarana Pendidikan a. Prasarana Pendidikan b. Sarana Pendidikan c. Monitoring dan Evaluasi	3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Permanent Permanent Musnah
D. KEOLAHRAGAAN	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Pengelolaan Olahraga Pendidikan	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanent

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah b. Olahraga Pendidikan Tinggi c. Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah
3.	Pengelolaan Olahraga Rekreasi	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	a. Olahraga Massal b. Olahraga Tradisional c. Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah
4.	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
5.	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
6.	a. Olahraga Tradisional b. Layanan Khusus	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	a. Kemitraan Keolahragaan			
	b. Penghargaan Olahraga		3 Tahun	Permanen
7.	Pembibitan dan IPTEK Olahraga	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	a. Pembibitan Olahraga b. Kompetisi c. IPTEK Olahraga			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
8.	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan a. Tenaga Keolahragaan b. Organisasi Keolahragaan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
9.	Industri dan Promosi Olahraga a. Industri Olahraga b. Promosi Olahraga	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
10.	Olahraga Prestasi a. Daerah b. Nasional c. Internasional	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
11.	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga a. Standardisasi Keolahragaan b. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan c. Infrastruktur Olahraga	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
E.	KEPEMUDAAN	3 Tahun		
1.	Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru		Permanen
2.	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda a. Penelusuran (Duta Kepemudaan) b. Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui Forum Kepemudaan)	2 Tahun 2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan		Permanen Permanen
3.	Pengembangan a. Wawasan Kebangsaan b. Wawasan Lingkungan c. Wawasan Sosial dan Hukum d. Peningkatan Kapasitas Pemuda a. Kapasitas Iman dan Taqwa	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun		Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah
4.		3 Tahun		

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Kapasitas IPTEK c. Pemanfaatan IPTEK	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
5.	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)			
	a. Pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pendayagunaan (Fasilitasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6.	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda			
	a. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
7.	Kewirausahaan			
	a. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengkaderan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Perintisan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8.	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan			
	a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pemberdayaan Organisasi Kependidikan: Kelembagaan dan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan dan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9.	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda			
	a. Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Infrastruktur Pemuda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
10.	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda			
	a. Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Penghargaan Pemuda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
F.	KEBUDAYAAN			
1.	Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman			
a.	Registrasi Nasional	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
b.	Pelindungan	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
c.	Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
d.	Eksplorasi dan Dokumentasi	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
3.	Pembinaan Kesenian dan Perfilman			
a.	Pembinaan Seni Pertunjukan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
b.	Pembinaan Seni Rupa	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
c.	Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
d.	Dokumentasi dan Publikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
4.	Sejarah dan Nilai Budaya			
a.	Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pemetaan Nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Verifikasi dan Perumusan Nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Dokumentasi dan Publikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f.	Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5.	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya			
a.	Internalisasi Nilai Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Kekayaan Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Warisan Budaya Nasional dan Dunia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Diplomasi Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
G.	KESEHATAN			
	1. Kebijakan di Bidang Kesehatan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Upaya Kesehatan Dasar			
	a. Pelayanan Kedokteran Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	
	b. Praktek Klinik Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer	2 Tahun	3 Tahun	
	c. Pelaksanaan Kesehatan Primer	2 Tahun	3 Tahun	
	d. Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	
	e. Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit	2 Tahun	3 Tahun	
	f. ICD 10, <i>Destistry</i> , dan <i>Stomatology</i>	2 Tahun	3 Tahun	
	g. Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah	2 Tahun	3 Tahun	
	h. Penyakit Mulut di Tingkat Primer	2 Tahun	3 Tahun	
	i. Pembayaran Darah	2 Tahun	3 Tahun	
	j. Penggunaan Darah Rasional	2 Tahun	3 Tahun	
	k. Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah	2 Tahun	3 Tahun	
	l. Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil, dan Kepulauan	2 Tahun	3 Tahun	
	m. Akreditasi Puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	
	n. Puskesmas Perprestasi	2 Tahun	3 Tahun	
	3. Upaya Kesehatan Rujukan			
	a. Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Tahun	3 Tahun	
	b. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	2 Tahun	3 Tahun	
	c. Pelayanan Rumah Sakit Privat	2 Tahun	3 Tahun	
	d. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	
	e. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	f. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa h. Badan Pengawas Rumah Sakit i. Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanaman Modal Asing j. Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	4. Keperawatan dan Keteknisian Medik a. Pelayanan Keperawatan Dasar b. Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit c. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum d. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus e. Bina Pelayanan Kebidanan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	5. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan a. Mikrobiologi dan Imunologi b. Patologi dan Toksilogi c. Radiologi d. Perizinan dan Sertifikasi Sarana dan Prasarana Kesehatan e. Sarana dan Prasarana Kesehatan f. Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan g. Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	6. Kesehatan Jiwa a. Kesehatan Jiwa di Nonfasilitas Pelayanan Kesehatan b. Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan c. Etikolegal dan Asesmen d. Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya e. Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko 7. Surveilans, Imunitasi, Karantina dan Kesehatan Matra	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa b. Imunisasi c. Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan d. Kesehatan Matra	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
8.	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pengendalian Tuberkolosis b. Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual c. Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut d. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan e. Pengendalian Kusta dan Frambusia	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
9.	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pengendalian Malaria b. Pengendalian Arbovirosis c. Pengendalian Zoonosis d. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
10.	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah b. Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
11.	Penyakit Kanker	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Penyakit Kronis dan Generatif e. Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
12.	Penyehatan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar b. Pemukiman dan Tempat Umum c. Kawasan dan Sanitasi Darurat d. Higien Sanitasi Pangan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	e. Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
13.	Gizi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
14.	Kesehatan Ibu	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
15.	Kesehatan Anak	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
16.	Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
17.	Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
18.	Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Harga Obat Publik b. Pengadaan Obat c. Perbekalan Kesehatan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
19.	Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan			
	a. Alat Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Produk Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
20.	Kefarmasian			
	a. Pelayanan Kefarmasian b. Farmasi Klinis c. Farmasi Komunitas	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	d. Penggunaan Obat Rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
21.	Produksi dan Distribusi Kefarmasian			
	a. Obat Tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kosmetik dan Makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
22.	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan			
	a. Surat Keterangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Sertifikasi dan Perijinan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
23.	Penanggulangan Krisis Kesehatan			
	a. Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan	2 Tahun	3 Tahun	
	b. Tanggap Darurat dan Pemulihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pemantauan dan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
24.	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan			
	a. Tersedianya Data NHA Setiap Tahun	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Tersediannya Dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
25.	Inteligensia Kesehatan a. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
26.	Kesehatan Haji a. Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
27.	Promosi Kesehatan a. Sarana Promosi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan Serta Pemberdayaan Peran Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan Hari Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
28.	D. Data dan Informasi a. Statistik Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Analisis dan Diseminasi Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
29.	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik Dan Produk Komplimen a. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Obat Asli Indonesia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
30.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Penilaian Keamanan Pangan b. Standardisasi Produk Pangan c. Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan d. Surveilans dan Penyuluhan Kemanan Pangan e. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 31. Rekam Medis	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Disesuaikan dengan Peraturan Kementerian/Lembaga Terkait	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	H. AGAMA DAN KEPERCAYAAN			
	1. Kebijakan di Bidang Agama dan Kepercayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Fasilitasi	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	a. Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota b. Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan c. Kasus Keagamaan d. Kasus Aliran Keagamaan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	e. Kasus Aliran Keagamaan 3. Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	a. Kelembagaan dan Kepercayaan b. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama c. Komunitasi Kepercayaan d. Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional e. Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1.	SOSIAL			
1.	1. Kebijakan di Bidang Sosial yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	2. Kesejahteraan Sosial Anak			
	a. Kesejahteraan Sosial Anak Balita	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	3. Rehabilitasi Sosial			
	a. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita Penyakit Kronis, Netra dan Rungu Wicara, Mental	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kelembagaan dan Advokasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			
	a. Gelandangan, Pengemis dan Pemulung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Tuna Susila dan Korban Trafficking Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan meliputi Penyiapan, Reintegrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pelayanan Sosial Orang dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA			
	6. Pelayanan Sosial Lanjut Usia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti Lemaga, Kerja Sama Lembaga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Kelembagaan meliputi Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaururatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
8.	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
9.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Ketahanan Sosial masyarakat meliputi Keseraman Sosial, Penguanan Sumber Daya Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Tanggap Darurat meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pemulihan Sosial meliputi Penguatan Sosial, Reintegrasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Kerja Sama meliputi Kerja Sama Pemerintah, Kerja Sama Non Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
10.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Kesiapsiagaan dan Mitigasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Tanggap Darurat meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Kerja Sama Jaminan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
11.	Seleksi dan Verifikasi	3 Tahun	7 Tahun	Musnrah
	Asuransi Kesejahteraaan Sosial meliputi Kelembagaan, Pengelolaan Premi	3 Tahun	7 Tahun	Musnrah
	Bantuan langsung dan Tunjangan Berkelaanjutan meliputi Pendampingan dan Penyaluran	3 Tahun	7 Tahun	Musnrah
	d. Kerja Sama	3 Tahun	7 Tahun	Musnrah
12.	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah
	a. Ketahanan Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah
	b. Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah
	c. Tenaga Kesejahteraaan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah
	d. Kemitraan Duniia Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah
	e. Karang Taruna meliputi Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
13.	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil			
a.	Persiapan Pemberdayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Penggalian dan Pengembangan Potensi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Keserasian dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Kerja Sama Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
14.	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan			
a.	Identifikasi dan Analisis	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b.	Pengembangan Kapasitas	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c.	Penataan Sosial Lingkungan Kumuh	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
d.	Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
e.	Bantuan Langsung	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
f.	Kerja Sama Kelembagaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
15.	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial			
a.	Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Pengembangan Kesetiakawanan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
J.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1.	Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilakukan oleh Pemerintahan Daerah			
	1.1.	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Penerintahan Desa dan Kelurahan			
a.	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Pengembangan Kapasitas Desa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat			
a.	Lembaga Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Pembangunan Partisipatif	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	c. Pendataan Potensi Masyarakat d. Pengembangan Kawasan Perdesaan e. Pelatihan Masyarakat	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanent Permanent
4.	Pembangunan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	
	a. Budaya Nusantara b. Pemberdayaan Perempuan c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga d. Kesejahteraan Sosial	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
5.	e. Tenaga Kerja Perdesaan f. Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	a. Usaha Pertanian dan Pangan b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam c. Produksi dan Pemasaran	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
6.	d. Usaha Ekonomi dan Keluarga e. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	f. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	
7.	b. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
K.	e. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	
	K. PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru		
1.	1. Kebijakan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman yang Dilakukan oleh Pemerintahan Daerah	2 Tahun 2 Tahun		
2.	Pertamanan	3 Tahun 3 Tahun		Permanent Permanent
	a. Perencanaan Pertamanan b. Taman Kota	2 Tahun 2 Tahun		Permanent Permanent

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF
3.	c. Tata Hias dan Ornamen Kota a. Perencanaan Pemakaman b. Pemakaman c. Pelayanan Pemakaman	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun
4.	Jalur Hijau a. Perencanaan Jalur Hijau b. Jalur Hijau Jalan c. Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun
5.	Peran Serta Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun
6.	Pengawasan dan Penindakan	2 Tahun	3 Tahun
7.	Pengelolaan Data	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun
8.	Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun
L.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
1.	Kebijakan di Bidang Pertamaman dan Pemakaman yang Dilakukan oleh Pemerintahan Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun
2.	Pendaftaran Penduduk	3 Tahun	3 Tahun
	a. Identitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun
	b. Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	2 Tahun	3 Tahun
	c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara	2 Tahun	3 Tahun
	d. Pendaftaan Penduduk Rentan	2 Tahun	3 Tahun
	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 Tahun	3 Tahun
3.	Pencatatan Sipil	3 Tahun	3 Tahun
	a. Kelahiran dan Kematian	2 Tahun	3 Tahun
	b. Perkawinan dan Perceraian	2 Tahun	3 Tahun
	c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta	2 Tahun	3 Tahun
	d. Pencatatan Kewarganegaraan	2 Tahun	3 Tahun

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Penyiapan Fasilitas b. Evaluasi Dan Pelaporan	1 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
4.	Profil dan Proyeksi Penduduk a. Data Profil dan Proyeksi Penduduk	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
5.	Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk b. Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
6.	Penetapan Sasaran Parameter a. Penetapan Sasaran Parameter	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
7.	Evaluasi Sasaran Parameter Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk a. Pemanfaatan Profil dan Proyeksi b. Pemanfaatan Parameter	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah
8.	Pengembangan Sistem a. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal b. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal Pengembangan Materi a. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal b. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
9.	Monitoring dan Evaluasi a. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal b. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
10.	Analisis Sosial	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
11.	Analisis Ekonomi	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
12.	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
13.	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
14.	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
15.	Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16.	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah Berencana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
a.	Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
17.	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
18.	Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
19.	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta	2 Tahun Setelah Standar Diperbarui	3 Tahun	Permanen
a.	Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta	2 Tahun Setelah Standar Diperbarui	3 Tahun	Permanen
b.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta	2 Tahun Setelah Standar Diperbarui	3 Tahun	Permanen
20.	Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a.	Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
21.	Berencana Wilayah Miskin Perkotaan			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF
	a. Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun
22.	Kesertaan Keluarga Berencana Pria a. Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria b. Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun
23.	Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak	2 Tahun	3 Tahun
24.	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	2 Tahun	3 Tahun
25.	Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas	2 Tahun	3 Tahun
26.	Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak a. Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun
	b. Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga dan Anak	2 Tahun	3 Tahun
27.	Monitoring Dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak a. Monitoring Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun
	b. Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun
28.	Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja a. Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan b. Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun
29.	Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja a. Monitoring Bina Ketahanan Remaja b. Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun
30.	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan a. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia b. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
31.	Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
32.	Monitoring Dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
33.	Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
34.	Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
35.	Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga a. Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga b. Pengembangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
36.	Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
37.	Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
38.	Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
39.	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b. Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
40.	Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
	a. Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi b. Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi	2 Tahun	3 Tahun		Permanen
41.	Advokasi dan Pencitraan	2 Tahun	3 Tahun		Musnah
42.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi a. Promosi b. Sarana Produksi Media Komunikasi c. Produk Media Komunikasi	1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun		Musnah Musnah Musnah
43.	Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi	2 Tahun	3 Tahun		Permanen
44.	Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota a. Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota b. Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun		Permanen Permanen
45.	Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah a. Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah b. Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun		Permanen Permanen
46.	Tenaga Lini Lapangan a. Pengembangan Tenaga Lini Lapangan b. Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun		Musnah Permanen
47.	Institusi Masyarakat Pedesaan a. Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan b. Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun		Musnah Permanen
48.	Mekanisme Operasional Lini Lapangan a. Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan b. Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun		Musnah Permanen
49.	Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan b. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
50.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
51.	Analisis dan Evaluasi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	a. Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk b. Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
52.	Sistem Aplikasi dan Bank Data	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	a. Pengembangan Sistem Aplikasi b. Pengelolaan Bank Data	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
53.	Infrastruktur Teknologi Informasi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	a. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi b. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
54.	Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah
	a. Dokumentasi dan Perpustakaan b. Pengelolaan Situs BKBN dan Media Konferensi	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah
N. HUBUNGAN MASYARAKAT				
	1. Keprotokolan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan Termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Buku Tamu Keprotokolhan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2. Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat	1 Tahun Selama Berlaku	1 Tahun	Musnah
	3. Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	a. Kliping Koran			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Brosur / Leaflet / Poster / Plakat c. Pengumuman / Pemberitaan	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah
5.	Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah a. Hubungan Antar Lembaga Pemerintah b. Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM c. Hubungan dengan Perusahaan d. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
6.	e. Forum Kehumasan f. Hubungan dengan Media Massa	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Permanent Permanent
7.	Dengar Pendapat/ Hearing DPRD Bahan/Materi Pidato/Sidang Muspida	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Permanent Permanent
8.	Provinsi/Kota/Kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	
9.	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal	1 Tahun	1 Tahun	
10.	Publikasi melalui Media Cetak Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	
11.	Pameran / Sayembara/Lomba/Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	1 Tahun	1 Tahun	
12.	Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	1 Tahun	1 Tahun	
VI.	PEREKONOMIAN			
	A. KETAHANAN PANGAN			
	1. Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanent
	2. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanent
	a. Ketersediaan Pangan b. Akses Pangan c. Kerawanan Pangan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanent Permanent Permanent
	3. Distribusi dan Cadangan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanent
	a. Distribusi Pangan			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Harga Pangan c. Cadangan Pangan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
4.	a. Konsumsi Pangan b. Penganelekragaman Pangan c. Keamanan Pangan Segar	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
5.	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	a. Dewan Ketahanan Pangan b. Penghargaan Ketahanan Pangan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
6.	Swasembada Pangan (Kearifan Lokasi)	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	
7.	Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	
8.	Evaluasi			
B.	PERDAGANGAN			
	1. Kebijakan di Bidang Perdagangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3 Tahun	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	Permanen
2.	Perdagangan Dalam Negeri	3 Tahun	3 Tahun	
	a. Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	2 Tahun	8 Tahun	
	b. Bina Usaha Jasa Perdagangan	2 Tahun	8 Tahun	
	c. Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	2 Tahun	8 Tahun	
	d. Informasi Perusahaan	2 Tahun	3 Tahun	
	e. Pelaku Pasar	2 Tahun	3 Tahun	
	f. Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	
	g. Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	
	h. Pengembangan Produk Lokal	2 Tahun	3 Tahun	
	i. Pencitraan Produk Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	
	j. Pengembangan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	
	k. Pengelolaan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1.	Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
m.	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
n.	Informasi Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
o.	Informasi Hasil Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
p.	Barang Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
q.	Bahan Pokok Agro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
a.	Kelembagaan dan Informasi Standar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
b.	Kerja Sama Standarisasi	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	8 Tahun	Permanen
c.	Perumusan dan Penerapan Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d.	Tata Usaha	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
e.	Kerja Sama, Informasi, dan Publikasi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
f.	Analisa Penyelegaraan Perlindungan Konsumen	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
g.	Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h.	Fasilitas Kelembagaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
i.	Produk Pertambangan dan Aneka Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
j.	Produk Pertanian, Kimia, dan Kehutanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
k.	Jasa	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
l.	Kerja Sama	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
m.	Sarana dan Kerja Sama	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
n.	Kelembagaan dan Penilaian	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
o.	UTTO dan Standar Ukuran	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
p.	Pengawasan	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	q. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran r. Balai Pengujian UTPP	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
4.	Perdagangan Berjangka Komoditi a. Pengkajian Pasar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan Transaksi	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan Keuangan dan Audit	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	d. Pengkajian Pasar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	e. Pengembangan Pasar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	f. Sistem Informasi	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	g. Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	h. Pengawasan Pasar Lelang	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	i. Pengawasan Sistem Gudang	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
5.	Bimbingan Teknis	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
6.	Evaluasi	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
C.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	1. Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun		
2.	Kelembagaan Koperasi dan UKM a. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF
	b. Tata Laksana Koperasi UKM	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun Permanent
	c. Keanggotaan Koperasi	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun Permanent
	d. Pengendalian dan Akuntabilitas	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun Permanent
	3. Produksi	3 Tahun Musnah	3 Tahun Permanent
	a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Tahun Musnah	3 Tahun Permanent
	b. Kehutanan dan Perkebunan	2 Tahun Musnah	3 Tahun Permanent
	c. Perikanan dan Peternakan	2 Tahun Musnah	3 Tahun Permanent
	d. Industri Kerajinan dan Pertambangan	2 Tahun Musnah	7 Tahun Permanent
	e. Ketenagalistrikian dan Aneka Usaha	2 Tahun Musnah	7 Tahun Permanent
	4. Pembiayaan	3 Tahun Program Pendanaan	7 Tahun Permanent
	a. Program Pendanaan	3 Tahun Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	7 Tahun Permanent
	b. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	3 Tahun Urusan Permodalan	7 Tahun Permanent
	c. Urusan Permodalan	3 Tahun Asuransi dan Jasa Keuangan	7 Tahun Permanent
	d. Asuransi dan Jasa Keuangan	3 Tahun Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	7 Tahun Permanent
	e. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	3 Tahun Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	7 Tahun Permanent
	f. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	3 Tahun Permanent	7 Tahun Permanent

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
5.	Pemasaran dan Jaringan Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Dalam Negeri b. Ekspor dan Impor c. Sarana dan Prasarana Pemasaran d. Kemitraan dan Jaringan Usaha 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah
6.	Informasi dan Publikasi Bisnis <ul style="list-style-type: none"> e. Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Koperasi dan UKM f. Pengembangan Sumber Daya Manusia 	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
7.	Pengembangan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM c. Peran Serta Masyarakat d. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM e. Advokasi 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
8.	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Produktifitas dan Mutu b. Restrukturisasi Usaha c. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) d. Fasilitasi Investasi UMKM e. Pengembangan Sistem Bisnis f. Pengkajian Sumber Daya UMKM <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian Koperasi 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
b. Penelitian UKM	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun		Permanen
c. Penelitian Sumber Daya	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun		Permanen
d. Pengembangan Perkaderan UMK	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun		Permanen
9. Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun		Permanen
10. Pedagang Kaki Lima (PKL)	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun		Musnah Musnah Permanen
a. Peraturan Perundang-Undangan				
b. Sarana dan Prasarana				
11. Monitoring dan Evaluasi				
D. KEHUTANAN				
1. Kebijakan di Bidang Kehutanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	7 Tahun		Permanen
2. Penyuluhan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun		Musnah Musnah Musnah Musnah
a. Program Kerja Penyuluhan				
b. Materi Penyuluhan				
c. Program Penyuluhan				
d. Sarana Penyuluhan				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
e.	Pengembangan Tenaga Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f.	Pelaksanaan Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g.	Pemberdayaan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h.	Deseminasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i.	Evaluasi dan Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	Planologi Kehutanan			
a.	Perencanaan Makro Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b.	Penataan Ruang Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c.	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d.	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
e.	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
f.	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
g.	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
h.	Pemantauan Sumber Daya Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
i.	Pemetaan Sumber Daya Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
j.	Jaringan Data Spasial	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
k.	Penggunaan Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
l.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
m.	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
n.	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
o.	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
p.	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
4.	Bina Usaha Kehutanan			
a.	Data Areal HPH /HTI /IUPHHK	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b.	SK HPH/HTI/IUPHHK	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c.	Kerja Sama	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d.	Pembatalan/Penolakan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
e.	Perpanjangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
f.	Modal dan Peralatan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
g. Investasi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
h. Peralatan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah	
i. Tenaga Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
j. Pemegang Saham	3 Tahun	7 Tahun	Musnah	
k. Neraca Perusahaan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
l. Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
m. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
n. Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
o. Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	3 Tahun	3 Tahun	Musnah	
p. Target Produksi RKT dan Beban Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
q. Produksi Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
r. Produksi Non kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
s. Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
t. Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
u. Industri Non Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
v. Hutan Tanaman Industri Pulp	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
w. Hutan Tanaman Industri Pertukangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
x. Pelanggaran dan Sanksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
y. Pemblokiran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
z. Denda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
aa. Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
ab. Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
ac. Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
ad. Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
ae. Pengembangan Investasi Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
af. Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
ag. Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
ah. Produksi Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
ai. Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	

6/1/8

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Konvensi Keanekaragaman Hayati	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Kawasan Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Pengamanan Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	k. Bina Cinta Alam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Kader Konservasi Sumber Daya Alam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Data Organisasi Pencinta Alam dan Kader Konservasi SDA	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7.	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial			
	a. Pengelolaan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Kebun Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Tegakan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Pengadaan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	e. Pengujian dan Penyimpanan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	f. Lalu Lintas Angkutan Benih	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pembibitan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	h. Lalu Lintas Angkutan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	i. Pengembangan Usaha Perbenihan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	j. Pengendalian Peredaran Benih	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	k. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	l. Tanaman Reboisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	m. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	n. Perhutanan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	o. Pengendalian Perladangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
3.	Perikanan Budidaya			
a.	Potensi Lahan dan Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Pengelolaan Induk Perbenihan Ikan Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Perbenihan Skala Kecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Informasi dan Distribusi Perbenihan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f.	Budidaya Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
g.	Budidaya Ikan Hias	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
h.	Sertifikasi Budidaya Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
i.	Data dan Statistik Perikanan Budidaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
j.	Hama dan Penyakit Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
k.	Perlindungan Lingkungan Budidaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
l.	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
m.	Kewirausahaan Budidaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
n.	Pelayanan Usaha Budidaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
o.	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
p.	Promosi Usaha dan Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
a.	Standarisasi Pengolahan Hasil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pengembangan Produk	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Industri Pengolahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f.	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
g.	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h.	Pengembangan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i.	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
j.	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
k.	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
l.	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
m.	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
n.	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
o.	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
p.	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
q.	Pengembangan Eksport	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
r.	Pengembangan Impor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
s.	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
t.	Pelayanan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
u.	Kemitraan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
v.	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
w.	Investasi dan Permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
x.	Informasi dan Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil			
a.	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Informasi dan Evaluasi Spasial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f.	Konservasi Wawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
g.	Konservasi Jenis Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
h.	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i.	Mitigasi Bencana Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
j.	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
k.	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
l.	Rehabilitasi dan Reklamasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
m.	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
n.	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
o.	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
p.	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	q. Akses Permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	r. Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	s. Sosial Budaya Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	t. Pengembangan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
	a. Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengawasan Usaha Budidaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Pengawasan Pencemaran Perairan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i. Logistik dan Operasional Wilayah Barat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Logistik dan Operasional Wilayah Timur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k. Perawatan Kapal Pengawas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Pengawakan Kapal Pengawas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	m. Sistem Pemantauan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	n. Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	o. Pemantauan Sumber Daya Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	p. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	q. Penyidikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	r. Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
	s. Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Perikanan			
	t. Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
7.	Karantina Ikan			
	a. Pemeriksaan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
b.	Penahanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Pengasingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Pengamatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Pengakuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f.	Penolakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g.	Pemusnahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h.	Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
i.	Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
j.	Permohonan Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
k.	Pemasukan Formulir	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
l.	Pemasukan Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
m.	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
n.	Surat Perintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
o.	Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
p.	Penutupan Suatu Area	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
q.	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
r.	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
s.	Pengawasan Pelaksanaan Operasional	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
t.	Instalasi Karantina Sementara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
u.	Lokasi Karantina	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
F. PERTANIAN				
1.	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3 Tahun 2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru		
2.	Perlindungan Holtikultura	3 Tahun 2 Tahun		
a.	Teknologi Perlindungan Tanaman Buah	2 Tahun 2 Tahun		
b.	Teknologi Perlindungan Tanaman Saturan dan Tanaman Obat	3 Tahun 2 Tahun		
c.	Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura	3 Tahun 2 Tahun		
d.	Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis	3 Tahun 2 Tahun		

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
3.	Perbenihan Hortikultura	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
a.	Penilaian Varietas			
b.	Pengawasan Mutu Benih			
c.	Budidaya dan Pascapanen Florikultura			
4.	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
a.	Basis Data Lahan			
b.	Pengendalian Lahan			
c.	Optimasi, Rehabilitasi, dan Konservasi			
d.	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan			
e.	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan			
5.	Pengelolaan Air Irrigasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
a.	Pengembangan Sumber Air			
b.	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air Iklim, Konservasi Air, dan Lingkungan Hidup			
c.	Kelembagaan			
d.	Pembentukan Pertanian			
6.	Data Informasi Pembentukan Program	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
a.				
b.	Pembentukan Syariah dan Kerja Sama			
c.	Pembentukan Agribisnis			
d.	Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis			
7.	Pupuk Pestisida	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
a.	Pupuk Organik dan Pembentahan Tanah			
b.	Pupuk Anorganik			
c.	Pestisida			
d.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida			
8.	Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah
a.	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian			
b.	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian			
c.	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian			
9.	Perbenihan Tanaman Pangan			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Produksi Benih Serealia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Kelembagaan Benih	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
10.	Buddidaya Serealia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Padi Irrigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Jagung	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Serealia Lain	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
11.	Buddidaya Aneka Kacang dan Umbi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Kedelai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Ubi Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Aneka Kacang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Aneka Umbi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
12.	Tanaman Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Dampak Perubahan Iklim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
13.	Pascapanen Tanaman Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Padi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Jagung dan Serealia Lain	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Kedelai dan Aneka Kacang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Aneka Umbi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
14.	Pengolahan Hasil Pertanian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Tanaman Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Hortikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Peternakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
15.	Mutu dan Standarisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Standarisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu c. Akreditasi dan Kelembagaan d. Kerja Sama dan Harmonisasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah
16.	Pengembangan Usaha dan Investasi a. Kemitraan dan Kewirausahaan b. Investasi c. Promosi Dalam Negeri d. Promosi Luar Negeri	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
17.	Pemasaran Domestik a. Informasi Pasar b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga c. Sarana dan Kelembagaan Pasar d. Jaringan Pemasaran	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen
18.	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja, dan Surat-Menyurat	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah
19.	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan a. Hasil Penelitian dan Pengembangan b. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen
20.	Diseminasi	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
21.	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian a. Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi Lainnya	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Musnah
22.	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
23.	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
24.	Data Penelitian dan Pengembangan	8 Tahun	8 Tahun	Permanen
25.	Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
26.	Hak Atas Kekayaan Intelektual			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Hak Cipta	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
	b. Hak Paten Sederhana	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
	c. Hak Paten Biasa	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
	d. Hak Merek	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
	e. Pendaftaran Varietas Tanaman	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	3 Tahun	1 Tahun	Permanen
	g. Permohonan Hak atas Kekayaan Intelektual yang Ditolak			Musnah
27.	Pelayanan Perizinan Pertanian			
	a. Sarana I (Bidang Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Sarana II (Bidang Benih Tanaman, Bahan Penelitian, Teknis Pangan Segar Asal Tumbuhan, Teknis Pengalihan Saham Perkebunan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Sarana III (Bidang Bibit, Karkas, Daging, dan Jeroan, Pakan Ternak, Obat Hewan, dan Teknis Sumber Daya Genetik Ternak)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
28.	Pelayanan Hukum			
	a. Sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pertimbangan Hukum	2 Tahun	8 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
29.	Karantina Pertanian a. Karantina Tumbuhan b. Karantina Hewan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah
30.	Bimbingan Teknis			
31.	Evaluasi			
G. PETERNAKAN				
1.	Kebijakan di Bidang Peternakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	
	b. Pakan Ternak	2 Tahun		
	c. Budidaya Ternak	2 Tahun		
	d. Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan (Permanen), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Permanen), Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan	2 Tahun		
	e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen (Permanen), Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitari dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan (Permanen), Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 Tahun	3 Tahun	

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
3.	Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
H. PERKEBUNAN				
1.	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
2.	Tanaman Semusim			
a.	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Perbenihan Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Pemberdayaan Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3.	Tanaman Rempah dan Penyegar			
a.	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Tanaman Tahanan			
a.	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Perbenihan Tanaman Tahanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Budidaya Tanaman Tahanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Perlindungan Perkebunan			
a.	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6.	Pascapanen dan Pembinaan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pascapanen Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelayutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7.	Bimbingan Teknis Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8.	Evaluasi Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
I.	PERINDUSTRIAN			
	1. Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Iklim Usaha dan Kerja Sama	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	3. Promosi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	a. Industri Manufaktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Promosi Industri Agro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Industri Kecil dan Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Standarisasi dan Teknologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
5.	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen
6.	a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
7.	Industri Hijau	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
8.	a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
9.	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
10.	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
12.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Internasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
13.	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
14.	Standardisasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
15.	a. Standar b. Penyiapan Penerapan c. Infrastruktur Standar	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen
16.	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
17.	a. Kebijakan Industri b. Perpajakan dan Tarif c. Pengembangan Model Industrial	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen
18.	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
19.	a. Industri Hijau b. Lingkungan Hidup c. Energi	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen
20.	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri b. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri c. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
16.	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	3 Tahun	7 Tahun	7 Tahun
J.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
1.	Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Rekomendasi Kegeologian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Geosains	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Pengukuran <i>Time Domain Electromagnetic</i> (TDEM)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Kelayakan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	Penelitian Kegeologian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Administrasi Pelaksanaan Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Administrasi Tenaga Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Administrasi Penggunaan Peralatan Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Log-book Peralatan Survey/Peralatan Uji/Kalibrasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Hasil Penelitian dan Penyelidikan Kegeologian	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	f. Sumber Daya Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	g. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	h. Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	i. Survei Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
4.	Inventarisasi dan Evaluasi Kegeologian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Sumber Daya Geologi			

0/0/0

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5.	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi			
	a. Peta Potensi dan Sebaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta Kebakaran Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Survei Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
6.	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	b. Rencana dan Realisasi Investasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Penetapan Harga Minyak Mentah	2 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	e. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	f. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	g. Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	h. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
7.	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	a. Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
b.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk Presentasi Makalah, Pembuakan Data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan <i>Interest</i> , Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survey Seismik, Laporan Data Pengeboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pengeboran Sumur Eksplorasi Tahunan	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
c.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (Publikasi Makalah, Analisa Laboratorium (<i>Reprocessing</i>)), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/ Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
d.	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	2 Tahun	2 Tahun	Permanen
e.	Perpanjangan Kontrak KKS	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
f.	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	5 Tahun	5 Tahun	Musnah

b d / 18

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
g. Partisipasi <i>Interest</i>		2 Tahun Setelah Penetapan Harga Gas yang Baru 2 Tahun Setelah Disetujui	5 Tahun	Permanen
h. Tumpang Tindih Lahan		2 Tahun	5 Tahun	Permanen
8. Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi		3 Tahun	3 Tahun	Permanen
a. Perumusan Pedoman, Prosedur, Layanan serta Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/Rekomendasi/Pendasahahan), Pengawasan Fasilitasi dan Pertimbangan Pelanggaran	2 Tahun	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
c. Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang Ditetapkan dengan Keputusan Menteri	2 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9. Teknik dan Lingkungan		5 Tahun	5 Tahun	Permanen
a. Perumusan Pelaksanaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	2 Tahun	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
b. Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain: Berkas Permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, dan Register NPT	2 Tahun	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
c. Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)	3 Tahun	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d. Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	3 Tahun	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
e. Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis , dan Pengawasan Keselamatan Operasi	2 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
f.	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, dan Pengawasan Keselamatan Operasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g.	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
h.	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukkan Calon Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, dan Surat Persetujuan/Pengesahan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i.	Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, dan Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
j.	Usaha Penunjang	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
10.	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
a.	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b.	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c.	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d.	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
11.	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
a.	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b.	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c.	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
d.	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
e.	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
f.	Penyusunan Neraca Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
g.	Road Map di Bidang EBT	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
12.	Panas Bumi			
a.	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b.	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c.	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
d.	Rekomendasi Bahan Peledak	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
e.	Perizinan Penggunaan Gudang Bahan Peledak	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
f.	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
g.	Persetujuan Sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan Kualifikasi Juru Las	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
h.	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
i.	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
j.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
k.	Penetapan Kapasitas Usaha Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
l.	Penetapan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	3 Tahun Setelah Lelang WKP Selesai	7 Tahun	Musnah
m.	Pengawasan Eksplorasi dan Eksplorasi Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
n.	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
o.	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
p.	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
13.	q. Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi Bioenergi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
a.	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Penerbitan Rekomendasi Eksport-Import	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Evaluasi/Revisi HIP BBN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f.	Database Pengusahaan Bioenergi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g.	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h.	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i.	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
14.	Aneka Energi			
a.	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Penetapan Kapasitas Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
15.	Konservasi Energi			
a.	Audit Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b.	Monitoring Implementasi Hasil Audit Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Manajamen Energi di Pengguna Energi di atas 6.000 TOE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Pengawasan Sertifikasi Label dan Tanda Hemat Energi pada Lampu Swabalaast	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Penyusunan Daftar Peralatan/Teknologi Efisiensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Penyusunan Emisi Energi Gas Rumah Kaca	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pemberian Insentif dan Disinsentif Konservasi Energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Profil Investasi Efisiensi Energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i. <i>Investment Grade Audit (IGA)</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16.	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE			
	a. Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d. Evaluasi Program Kerja	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
17.	Bina Program Tenaga Listrik			
	a. Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, antara lain: Dokumen <i>Grant / Hibah / Loan Agreement</i> Luar Negeri, Monitoring <i>Loan</i> Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Penanganan Permasalahan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, dan Laporan Kegiatan Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Listrik Pedesaan, antara lain: Data Program Listrik Perdesaan, Data Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan Evaluasi Listrik Perdesaan, dan Listrik Untuk Masyarakat Tidak Mampu	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	c. Data dan Informasi Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
18.	Bina Usaha Ketenagalistrikan			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, dan Data Laporan Berkala Pemegang Izin	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
	b. Harga dan Subsidi Listrik	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Hubungan Komersial Tenaga Listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Perlindungan Konsumen Listrik, antara lain: Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik, Dokumen Pengawasan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Realisasi Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, dan Dokumen Evaluasi Pemberian Kompensasi Pinjaman Tingkat Mutu Pelayanan PT. PLN (Persero)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
19.	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	3 Tahun	3 Tahun	
	a. Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	
	b. Penyiapan Kompetensi dan Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	
	c. Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), dan Dokumen Penandasan Rencana Impor Barang (RIB)	2 Tahun	3 Tahun	
20.	Sertifikasi	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen
	a. Dokumen Sertifikasi Produk Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen
	b. Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen
	c. Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik e. Registrasi Sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah Permanen
21.	Akreditasi Ketenagalistrikan	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen
22.	Standardisasi Kompetensi	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen
23.	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah Musnah
24.	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 2 Tahun Setelah Ditetapkan 2 Tahun Setelah Ditetapkan 2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku 2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
25.	Bina Program Mineral dan Batu Bara	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	a. Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batu Bara b. Rencana Induk Mineral dan Batu Bara			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	c. Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Data dan Informasi Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pelaporan Program Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (Wk) Mineral dan Batu Bara Melalui Lelang Reguler	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	g. Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batu Bara	3 Tahun Setelah	7 Tahun	Musnah
	h. Perencanaan Produksi Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
26.	Pembinaan Pengusahaan Mineral	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	a. Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
	c. Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Mineral	2 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	3 Tahun	5 Tahun	Permanen
	e. Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Mineral	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	f. Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral (Logam, Bukan Logam Batuan, Radioaktif, dan Mineral Jarang)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	g. Perizinan Usaha Pertambangan Mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	h. Kontrak Karya (KK)	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	i. Pengelolaan Barang Kontrak Karya (KK)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j. Persetujuan Objek Vital Nasional (OBVTNAS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	k. Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, pada Perusahaan Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	l. Teguran kepada Pengusahaan Kontrak Karya (KK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait Usaha Pertambangan Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	n. Pedoman / Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Awal Sampul dengan Rancangan Akhir	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	o. Pelaporan Usaha Pertambangan Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	p. Penghargaan Usaha Pertambangan Mineral q. Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	2 Tahun 2 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
27.	Pembinaan Pengusahaan Batu Bara a. Ketenagakerjaan b. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang c. Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Batu Bara d. Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara e. Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Batu Bara f. Pengawasan Produksi dan Pemasaran Batu Bara (Bitumen Padat, Batuan Aspal, Batu Bara dan Gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batu Bara PKP2B, IUP, hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batu Bara g. Perizinan Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	h. Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)			Permanen
	i. Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B), antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Aset Perusahaan Batu Bara			Permanen
	j. Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)			Permanen
	k. Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, pada Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)			Permanen
	l. Teguran Kepada Pengusaha Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)			Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	m. Tanggapan Kepada Pemerintah Daerah Terkait Usaha Pertambangan Batu Bara n. Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral n. Termasuk Rancangan Awal Sampul dengan Rancangan Akhir o. Pelaporan Usaha Pertambangan Batu Bara p. Penghargaan Usaha Pertambangan Batu Bara q. Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean (CnC)</i> Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun	Musnah Permanen
28.	Penerimaan Negara a. Penerimaan Negara Bukan Pajak b. Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
29.	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara a. Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/RSKKN (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain: <i>Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)</i> , dan Standar Nasional Indonesia (SNI) b. Pengawasan Standardisasi c. Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang d. Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	e. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Rekomendasi Bahan Kimia	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
	i. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j. Laporan Berkala Teknik dan Lingkungan Pertambangan/Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k. Pemberian Penghargaan, antara lain: Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Lingkungan Pertambangan, dan Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Pengawasan Lingkungan Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Usaha Jasa Mineral dan Batu Bara	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	n. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
o.	Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, dan Surat Rekomendasi Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
p.	Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, dan Surat Persetujuan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
q.	Pengawasan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
r.	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
s.	Peminaaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara, antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
30.	Program Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
a.	Rencana Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pengembangan dan Inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Dokumen Penerapan/Pemanfaatan/Pendayagunaan/Replikasi/Prototipe Hasil Penelitian/Pengkajian/Pengembangan/Inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Advokasi dan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Diseminasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f.	Pembinaan Penelitian/Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g.	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
h.	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	i. <i>Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j. Hak Atas Kekayaan Intelektual	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	k. Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Layanan Jasa Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Sertifikasi Personil Peneliti Bidang Sumber Daya Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
31.	Sarana Litbang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Administrasi Penggunaan Peralatan	1 Tahun Setelah Peralatan Dihapus	5 Tahun	Permanen
	b. Log-Book Peralatan Survey/Peralatan Uji Kalibrasi			
32.	Afiliasi			
	a. Proyek Percontohan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Penyajian Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
33.	Penelitian dan Pengembangan Kegelogian			
	a. Pemetaaan dan Penelitian Geologi, Geokimia, dan Geofisika Kelautan	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen
	b. Energi Kelautan dan Kewilayahahan Penelitian Energi dan Kewilayahhan Pantai	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen
	c. Penelitian Sumber Daya Energi dan Mineral Kelautan	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen
	d. Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen
34.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen
	a. Teknologi Eksplorasi			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Teknologi Eksplorasi	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen
	c. Laboratorium	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	3 Tahun	Permanen
	d. Study	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	3 Tahun	Permanen
	e. Teknologi Proses	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	f. Teknologi Aplikasi Produk	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	g. Teknologi Gas	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
35.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batu Bara	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	a. Teknologi Eksplorasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Teknologi Pemanfaatan Batu Bara	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
36.	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	a. Energi Baru Terbarukan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Teknologi Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Lingkungan dan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
K.	PERHUBUNGAN	3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	1. Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2. Jaringan Prasarana dan Pelayanan			
	a. Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul dan Tipe Penunjang			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
b.	Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota/Provinsi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
e.	Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota/Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f.	Jaringan Lintas pada Jaringan Jalan Primer	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
g.	Penetapan Kelas Jalan Primer	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
h.	Kualifikasi Teknis Petugas Terminal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
i.	Jaringan Transportasi Jalan Sekunder	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
3.	Pengembangan Transportasi Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
a.	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pengembangan Transportasi Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
a.	Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Akkreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Teknologi Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
a.	Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a.	Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional di Luar Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
7.	b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional Perlengkapan Jalan a. Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan b. Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan c. Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor d. Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor e. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah
8.	Angkutan Penumpang a. Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi b. Izin Trayek Angkutan Penumpang untuk Trayek Lintas Batas Negara c. Izin Trayek antar Kota antar Provinsi d. Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Bersifat Lintas Batas Negara dan Antar Kota/Provinsi	2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen
9.	Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan Umum f. Pemberian Subsidi Angkutan Umum g. Angkutan Perintis h. Penghargaan Perusahaan Angkutan Umum i. Angkutan Barang a. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Tarif Angkutan Barang c. Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu d. Pembinaan Angkutan Barang e. Izin Dispensasi Angkutan Jalan	2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
10.	Monitoring Operasional			
	a. Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan, Penertiban dan Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Operasional Kendaraan Angkutan Umum yang Menjadi Kewenangan Berkas Pelanggaran Perda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11.	c. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pedoman Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Bimtek Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Tahun		Musnah
12.	Analisa dan Evaluasi Jaringan-Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a. Pendataan Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	b. Analisis serta Informasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
13.	Pengembangan Jaringan-Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a. Pengembangan dan Penetapan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Peta Jaringan, Blueprint Jaringan)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
14.	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
15.	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
a.	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b.	Pengawakan dan Registrasi Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16.	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
a.	Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b.	Pemberian Sertifikasi Pelabuhan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
17.	Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
18.	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	
a.	Manajemen Lalu Lintas	2 Tahun	3 Tahun	
b.	Tata Cara Berlalu Lintas di Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	
c.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau	2 Tahun	3 Tahun	
d.	Sertifikasi Inspektur Sungai dan Danau dan Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai dan Danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
19.	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
a.	Pengerukan Alur Pelayaran Sungai, Danau dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Penetapan Kelas Alur dan Peta Alur Pelayaran Sungai dan Danau	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Perambuan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
20.	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a.	Penyelenggaraaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Persetujuan Operasi Kapal Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
21.	Tarif dan Keperintisan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a.	Perhitungan Tarif, Pemantauan Tarif Angkutan dan Jasa Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b.	Kriteria dan Pelaksanaan Keperintisan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
22.	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a.	Jaringan Transportasi Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Transportasi Perkotaan Yang Berbasis Jalan, Jalan Rel dan Perairan Daratan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Transportasi Perkotaan untuk Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
23.	Lalu Lintas Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di Wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
24.	Angkutan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a.	Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dalam Trayek	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Jaringan Trayek Perkotaan c. Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
25.	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek untuk Angkutan Penumpang dan/ atau Barang b. Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan yang Menghubungkan Antar Simpul (Bandara, Pelabuhan, Stasiun, dan Terminal) di Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi c. Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi 	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
26.	Dampak Transportasi Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berawasan Lingkungan b. Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan c. Masterplan Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan d. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Kota e. Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan f. Masterplan Transportasi Perkotaan 	2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen
27.	Monitoring Evaluasi Manajemen Kelesaman <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi Data Kecelakaan b. Kualifikasi Unit Pengkajian 	2 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
28.	c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
29.	a. Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan b. Harmonisasi Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
30.	a. Promosi Keselamatan: Penyuluhan, Publikasi dan Destinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan b. Kemitraan Keselamatan Antar Lembaga dan Masyarakat di Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
31.	a. Bina Keselamatan Angkutan Umum b. Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum c. Keselamatan Awak Angkutan Umum dan Awak Kapal Sungai dan Danau	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
32.	a. Audit Keselamatan b. Pedoman Audit Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia c. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Jalan dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	2 Tahun	Permanen
	c. Audit Faktor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan serta Fungsi Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pedoman Keselamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
b.	Inspeksi Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Investigasi Kecelakaan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, serta Laik Fungsi Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
33.	Parkir			
a.	Surat Tugas Juru Parkir	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b.	Izin Tempat Khusus Parkir Swasta	2 Tahun Setelah Ada Izin Baru	3 Tahun	Musnah
c.	Surat Tugas TKP Pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
L.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1.	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	7 tahun	Permanen	
		3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru		
2.	Telekomunikasi			
a.	Layanan Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Layanan Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3.	Penyiaran			
a.	Pemetaan Penyelegaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Data Base Penyelegaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal			
a.	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Layanan Khusus Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Pelayanan Kewajiban Universal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Pengembangan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Pengendalian Informatika			
a.	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
6.	b. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi c. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran d. Pencegahan dan Penertiban	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
6.	e-Government	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
7.	a. Tata Kelola e-Government b. Teknologi dan Infrastruktur e-Government c. Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government d. Aplikasi Layanan Kepemerintahan e. Aplikasi Layanan Publik	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
7.	e-Business	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
8.	a. Tata Kelola e-Business b. Teknologi dan Infrastruktur e-Business c. Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business d. Aplikasi Layanan e-Business	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
8.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
9.	a. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan b. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
9.	Pemberdayaan Industri Informatika	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
10.	a. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika b. Industri Perangkat Informatika Pengguna c. Industri Perangkat Lunak d. Industri Konten Multimedia	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
10.	Keamanan Informasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen
11.	a. Tata Kelola Keamanan Informasi b. Teknologi Keamanan Informasi c. Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan d. Penyidikan dan Penindakan e. Budaya Keamanan Informasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
11.	Komunikasi Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Pengelolaan Opini Publik c. Layanan Komunikasi Publik	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
12.	Pengolahan dan Penyediaan Informasi a. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
	b. Informasi Perekonomian	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
	c. Informasi Kesejahteraan Rakyat	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
13.	Pengelolaan Media Publik a. Media Cetak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
	b. Media Online	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
	c. Media Luar Ruang dan Audio Visual	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
14.	Kemitraan Komunikasi	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerjasama Berakhir Dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	a. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara		3 Tahun	Musnah
	b. Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerjasama Berakhir Dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	c. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerjasama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak Telah ditunaikan		Musnah
15.	Infrastruktur Informatika			
	a. Jaringan	2 tahun	3 Tahun	
	b. Piranti Teknologi Informatika	2 tahun	3 Tahun	
	c. Keamanan Informatika	2 tahun	3 Tahun	
16.	Sistem dan Data			
	a. Portal dan Konten	2 tahun	3 Tahun	
	b. Pengumpulan dan Pengolahan Data	2 Tahun	3 Tahun	
	c. Pengembangan Aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	
17.	Pusat Kerjasama			
	a. Kerja Sama Daerah	2 Tahun	3 Tahun	
	b. Kerja Sama Bilateral	2 Tahun	3 Tahun	
18.	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat			
	a. Pelayanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	
	b. Hubungan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	
	c. Bimbingan Teknis	1 Tahun	1 Tahun	
19.	Evaluasi			
M.	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	1. Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Setelah Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Pengembangan Destinasi Wisata			
	a. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Daya Tarik Wisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Industri Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
3.	e. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event Pemasaran Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4.	a. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata b. Promosi Pariwisata Luar Negeri c. Promosi Pariwisata Dalam Negeri d. Pencitraan Indonesia	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen
5.	a. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media b. Desain dan Arsitektur c. Kerja Sama dan Fasilitasi d. Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK e. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media f. Desain dan Arsitektur g. Kerja Sama dan Fasilitasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
6.	a. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi b. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan c. Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi d. Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
N.	STATISTIK	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru		Permanen
	1. Kebijakan di Bidang Statistik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3 Tahun		Permanen
	2. Sensus Penduduk, Pertanian dan Ekonomi a. Perencanaan	2 Tahun 3 Tahun		Permanen

6/18

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
b.	Persiapan, antara lain: Penyusunan Rancangan Organisasi Kegiatan Sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan Konsep dan Definisi, Penyusunan Metodologi (Cakupan, Organisasi, Lapangan, Ukuran Statistik, Prosedur), Penyusunan Buku Pedoman (Pencacahan, Pengawasan, Pengolahan), Penyusunan Peta Wilayah Kerja dan Muatan Peta Wilayah, Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Sosialisasi Kegiatan kepada Stakeholder dan Sumber Data (Leaflet, Poster, Pertemuan), Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi (Intern dan Ekstern), Pelaksanaan Pelatihan Instruktur (TOI), Pelaksanaan Pelatihan Petugas, Penyusunan Program Pengolahan (Rule Validasi, Pemeriksaan Data Entri, Tabulasi), Pelatihan Petugas Pengolahan, Perancangan Tabel, Pelaksanaan Uji Coba	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
c.	Pelaksanaan Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
d.	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan Dokumen (Penerimaan/Pengiriman, Pengelompokan/Batching), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (Editing/Coding), Perekaman Data (Entri, Scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
e.	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	1 Tahun	3 Tahun	Permanen
f.	Diseminasi Hasil Sensus	2 Tahun	1 Tahun	Permanen
3.	Survei			
a.	Perencanaan	3 Tahun		
b.	Persiapan	1 Tahun		

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
c.	Pelaksanaan Lapangan, antara lain: Pelaksanaan Listing, Pemilihan Sampel, Pengumpulan Data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring Kualitas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
d.	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan Dokumen (Penerimaan/Pengiriman, Pengelompokan/Batching), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (<i>Editing/Coding</i>), Perekaman Data (Entri, Scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
e.	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan Angka Hasil Pengolahan, Penyusunan Angka Sementara, Penyusunan Angka Tetap, Penyusunan/Pembahasan <i>Draft</i> Publikasi, Analisis Data, Penyusunan Publikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
f.	Diseminasi Hasil Survei	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4.	Konsolidasil Data Statistik	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
a.	Kompilasi Data	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b.	Analisis Data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Penyusunan Publikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei dan Konsolidasi Data Statistik			
O.	KETENAGAKERJAAN	2 Tahun Setelah Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
1.	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
2.	Perencanaan Tenaga Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
3.	Pengembangan Standardisasi Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Standar Kompetensi b. Pengembangan Standardisasi Kompetensi c. Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan d. Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan e. Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
4.	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan b. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan c. Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan d. Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun Setelah Kerja Sama Selesai dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen
5.	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> a. Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah b. Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta c. Tenaga Pelatihan d. Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
6.	Bina Pemagang <ul style="list-style-type: none"> a. Pemagangan Dalam Negeri b. Pemagangan Luar Negeri c. Perizinan dan Advokasi Pemagangan d. Promosi dan Jenjang Pemagangan 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
7.	Produktivitas dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan b. Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas c. Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas d. Pengembangan Kewirausahaan 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
8.	Pengembangan Pasar Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Pasar Kerja b. Analisis Pasar Kerja c. Bursa Kerja d. Analisis Jabatan 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
9.	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> a. Antar Kerja b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan d. Pemberdayaan Pengantar Kerja 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
10.	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal b. Pengembangan Padat Karya c. Terapan Teknologi Tepat Guna d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
11.	Standardisasi Profesi <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi dan Registrasi b. Pembakuan Akreditasi 	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
12.	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama b. Perjanjian Kerja c. Kesejahteraan Pekerja d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
13.	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha b. Kelembagaan Hubungan Industrial c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
14.	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengupahan 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
15.	b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial b. Penyelegaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16.	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja a. Pengawasan Norma Kerja b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah Musnah
17.	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan b. Pengawasan Norma Kerja Anak c. Kerjasama Lintas Sektoral d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
18.	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
19.	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
20.	Bina Penegakan Hukum a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

1/1/18

6/1/18

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil d. Kerjasama Penegakan Hukum	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen
21.	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	a. Analisis dan Standardisasi Bidang K3 b. Hasil Kajian, Perekayasaan dan Penerapan Teknologi dan Alih Teknologi K3 c. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
22.	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
	a. Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 b. Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	c. Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 d. Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	e. Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 f. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	P. PENANAMAN MODAL			
	1. Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Perencanaan Penanaman Modal			
	a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya b. Perencanaan Industri manufaktur c. Perencanaan Jasa dan Kawasan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah

19/10

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
3.	d. Perencanaan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Deregulasi Penanaman Modal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Pemberdayaan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4.	f. Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Promosi Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Analisis Strategi Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Fasilitasi Promosi Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Promosi Sektoral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	e. Fasilitasi Promosi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Pameran dan Sarana Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Kerja Sama Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kerja Sama Regional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pemantauan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Data Realisasi Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pengawasan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7.	f. Pencabutan/ Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	Pelayanan Penanaman Modal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	a. Pelayanan Aplikasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Pelayanan Perizinan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Pelayanan Konsultasi Perizinan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Pelayanan Nonperizinan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Pelayanan Fasilitas	2 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
Q. PERTANAHAN				
1. Kebijakan bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
2. Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan				
a. Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Permanen
b. Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Permanen
c. Data dan Informasi Pertanahan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Permanen
d. Advokasi dan Pengendalian	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Permanen
3. Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah				
a. Penatagunaan Tanah	2 Tahun Setelah Izin Tidak Berlaku	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Data dan Pemetaan Tematik	2 Tahun Setelah Izin Tidak Berlaku	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Penguatan Atas Tanah	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
4. Sengketa Tanah				
a. Pengkajian dan Penanganan Sengketa	2 Tahun Setelah Adanya Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Advokasi dan Pengendalian	2 Tahun Setelah Adanya Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
R. TRANSMIGRASI				
1. Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
2. Penyediaan Tanah Transmigrasi				
a. Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pengurusan Legalitas Tanah	2 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Dokumentasi Pertanahan	2 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Advokasi Pertanahan	2 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
3.	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Lahan b. Penyiapan Sarana c. Penyiapan Prasarana d. Evaluasi Kelayakan Permukiman 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
4.	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Calon Transmigrasi b. Penyiapan Perpindahan c. Pelaksanaan Perpindahan d. Penataan dan Adaptasi 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
5.	Partisipasi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi dan Motivasi b. Kerjasama Kelembagaan c. Kerjasama Antar Daerah d. Pelayanan Investasi 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen
6.	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan b. Bina Sistem Informasi 	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> c. Perencanaan Pengembangan Kawasan d. Perencanaan Pengembangan Masyarakat e. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan Pangan dan Kesehatan b. Fasilitas Sosial Budaya c. Pengembangan Kelembagaan 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
8.	d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi a. Kewirausahaan b. Produksi c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran d. Lembaga Ekonomi dan Permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan a. Analisis dan Standardisasi Sarana dan Prasarana b. Pengembangan Sarana c. Pengembangan Prasarana d. Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
10.	Penyeriasian Lingkungan a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan b. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen
VII.	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN A. PEKERJAAN UMUM 1. Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2. Penatagunaan Sumber Daya Air a. Perencanaan Wilayah Sungai b. Kelembagaan c. Pemanfaatan Sumber Daya Air d. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air e. Pengaturan dan Pemantauan	2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah
	3. Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air b. Manajemen Mutu c. Informasi dan Data Sumber Daya Air	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
4.	d. Keterpaduan Pemrograman a. Pengelolaan Sumber Daya Air b. Pengelolaan Irigasi dan Rawa c. Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung d. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air a. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai b. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa c. Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung d. Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku e. Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6.	Pengendalian Lumpur (Bencana Lokal Lingkup Nasional) a. Perencanaan Pengendalian Lumpur b. Pemrograman Pengendalian Lumpur c. Pelaksanaan Pengendalian Lumpur d. Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
7.	Pengembangan Jaringan Jalanan a. Keterpaduan Perencanaan b. Sistem Jaringan Jalan c. Lingkungan dan Keselamatan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8.	Pembangunan Jalan a. Standar dan Pedoman b. Manajemen Konstruksi c. Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage d. Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9.	Preservasi Jalan a. Standar dan Pedoman b. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
10.	c. Teknik Rekonstruksi d. Teknik Pemeliharaan Jalan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
11.	a. Standar dan Pedoman b. Perencanaan Teknis c. Teknik Jembatan d. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen
12.	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
13.	a. Bimbingan Teknik Jalan Daerah b. Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar c. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 8 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
14.	Pengaturan Jalan Tol	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
15.	a. Persiapan Pengusahaan Jalan Tol b. Pengadaan Investasi Jalan Tol c. Teknik Pengaturan Jalan Tol d. Pengambilalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	8 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen
16.	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
17.	a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan b. Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah
18.	Pembangunan Kawasan Permukiman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
19.	a. Perencanaan Teknis b. Kawasan Permukiman Perkotaan c. Kawasan Permukiman Pedesaan d. Kawasan Permukiman Khusus	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
20.	e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
21.	Pembinaan Penataan Bangunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
22.	a. Perencanaan Teknis b. Penataan Bangunan Gedung c. Pengelolaan Rumah Negara d. Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
23.	e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
16.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
a.	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f.	Peningkatan Penyele.nggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
g.	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
17.	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
a.	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Pengelolaan Air Limbah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Pengelolaan Persampahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f.	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
18.	Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
B.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
1.	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	Permanen
2.	Perencanaan Perumahan	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
a.	Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	Pola Pembiayaan Perumahan	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
a.	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Pola Investasi Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4.	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
a.	Sumber Pembiayaan Primer	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Sumber Pembiayaan Sekunder c. Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya d. Sistem Pembiayaan Perumahan e. Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
5.	Perencanaan Penyediaan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Keterpaduan Perencanaan b. Analisa Teknik c. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian d. Kemitraan dan Kelembagaan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
6.	Penyediaan Rumah Susun	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Perencanaan Teknik b. Penyediaan c. Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan d. Pengelolaan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
7.	Penyediaan Rumah Khusus	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	a. Perencanaan Teknik b. Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus c. Bimbingan Teknis dan Supervisi d. Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya e. Perencanaan Teknik f. Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni g. Pelaksanaan Bantuan Simultan	1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen
8.	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	a. Perencanaan Teknik b. Pemberian Bantuan Rumah Umum c. Fasilitasi Hunian Berimbang d. Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
9.	Investasi Infrastruktur	1 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	a. Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur b. Sinkronisasi Investasi Infrastruktur			

A / n / 19

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
10.	c. Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur d. Pasar Infrastruktur	2 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah
11.	a. Sistem Penyelenggaraan b. Kontrak Konstruksi c. Konstruksi Berkelanjutan d. Manajemen Mutu	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
12.	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi a. Kelembagaan b. Material dan Peralatan Konstruksi c. Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri d. Usaha Jasa Konstruksi	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
13.	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi a. Standar dan Materi Kompetensi b. Penerapan Kompetensi c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi d. Pengembangan Produktivitas	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanent Musnah
14.	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi a. Peningkatan Kerjasama b. Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
15.	Peningkatan Jasa Konstruksi a. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja b. Pelaksanaan Pengendalian Mutu	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanent
16.	Penerapan Teknologi Konstruksi a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi b. Pengembangan Materi c. Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanent
	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR) a. Antar Sektor b. Antar Wilayah	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanent Permanent

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
17.	Pengembangan Kawasan Strategis	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
a.	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
18.	Pengembangan Kawasan Perkotaan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
a.	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen Permanen
d.	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen Permanen
e.	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen Musnah
19.	Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
C.	TATA RUANG (TATA KOTA)	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
1.	Kebijakan di Bidang Tata Ruang yang Dilakukan Pemerintah Daerah	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
2.	Perencanaan	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
a.	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
b.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
c.	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
d.	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
e.	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
f.	Rencana Teknis Prasarana Kota	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
g. Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota Prasarana Kota	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
3. Pemanfaatan dan Pengendalian				
a. Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Ijin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
4. Pemetaan				
a. Peta Dasar	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Survey Pemetaan Ruang Darat	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Survey Pemetaan Ruang Air	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Survey Pemetaan Ruang Udara	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
D. LINGKUNGAN HIDUP				
1. Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
2. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Inventarisasi, Penerapan Ekoregion, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
3. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
a. Evaluasi Penerapan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Perencanaan Lingkungan Hidup	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
4. Ekonomi Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
5. Dampak Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
a. Bimtek Dampak Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Penerapan Sistem Kebijakan Dampak lingkungan	3 Tahun	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut	3 Tahun	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
6. Pemantauan dan Pengawasan				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Manufaktur Prasarana dan Jasa b. Pertambangan Energi, Minyak dan Gas c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil d. Udara Sumber Bergerak	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
7.	Evaluasi dan Pengembangan			
	a. Manufaktur Prasarana dan Jasa b. Pertambangan Energi, Minyak dan Gas c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil d. Udara Sumber Bergerak	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
8.	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian			
	a. Pengembangan b. Pemanfaatan c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik d. Keamanan Hayati e. Pengendalian Kerusakan Lahan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
9.	Pengendalian Kerusakan Perairan Darat			
	a. Kerusakan Ekosistem b. Rawa	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
10.	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer			
	a. Perangkat Mitigasi b. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca c. Pengendalian Bahan Perusak Ozon d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen
11.	Adaptasi Perubahan Iklim			
	a. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi b. Kerentanan Perubahan Iklim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
12.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun			
	a. Registrasi dan Notifikasi b. Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	1 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
13.	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut a. Pengumpulan dan Pemanfaatan b. Pengangkutan dan Pengolahan c. Penimbunan dan Dumping d. Notifikasi dan Rekomendasi Limdah Lintas Batas	1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
14.	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihian	1 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
15.	a. Pemantauan b. Tanggap Darurat dan Pemulihian Kontaminasi Pengelolaan Sampah	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
16.	a. Pembatasan Sampah b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah c. Pembentukan Dewan Adipura d. Penetapan Pemenang Adipura	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
17.	Hukum Administrasi Lingkungan a. Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan b. Penetaan Hukum Administrasi Lingkungan	1 Tahun 2 Tahun	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun 3 Tahun
18.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan a. Penyidikan b. Koordinasi Penuntutan, Evaluasi dan Tindak Lanjut c. Koordinasi Pembinaan Penyidik PNS	b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan a. Pengembangan Komunikasi	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun
19.	Kommunikasi Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
20.	b. Publikasi dan Kampanye a. Komunitas Pendidikan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
21.	b. Kearifan Lingkungan Peningkatan Peran Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen Permanen
22.	a. Masyarakat Perkotaan b. Masyarakat Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
23.	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan a. Organisasi Sosial Masyarakat b. Organisasi Profesi Dunia Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen Permanen
24.	Data dan Informasi Lingkungan a. Pengelolaan Data b. Pengelolaan Informasi c. Pengembangan Perangkat Lunak d. Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
25.	Kelembagaan dan Tata Laksana b. Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Standardisasi dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen Permanen
26.	a. Standardisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan b. Standardisasi Kompetensi Kehilian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan c. Teknologi Ramah Lingkungan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
VIII.	A. PENGAWASAN INTERNAL 1. Rencana Pengawasan a. Rencana Strategis Pengawasan b. Rencana Kerja Pengawas Tahunan	3 Tahun 2 Tahun	7 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah

10 / 19

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
c.	Rencana Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2.	Pelaksanaan Pengawasan			
a.	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL)	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun	Permanen
b.	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah Keputusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
c.	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tidak Memerlukan Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah Keputusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
d.	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	2 Tahun Setelah Proses Data Di-Update	3 Tahun	Permanen
f.	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
g.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
h.	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
i.	Good Corporate Governance (GCG)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
IX.	KEPEGAWAIAN			
A.	SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan	2 Tahun Sejak Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Musnah
	b. Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi ASN, Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
	d. Standarisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	2 Tahun Sejak Standar Baru Ditetapkan	3 Tahun	Permanen
2.	Formasi dan Pengadaan Pegawai	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
	a. Formasi ASN, antara lain: Usulan Formasi, Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
	b. Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
	c. Pengumuman Kelulusan ASN			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Berkas Lamaran yang Tidak Diterima e. Pengangkatan ASN	1 Tahun 1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah
	f. Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan) g. Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN h. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah
3.	3. Mutasi Pegawai a. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN b. Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
	c. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	1 Tahun Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
	e. Peninjauan Masa Kerja	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
	f. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Pengembangan Karir	1 Tahun Sejak Selesaianya Pertanggungjawaban Suatu Penugasan Diperbaharui (Update)	1 Tahun	Musnah
	a. Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/ Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi Lain/ Pertukaran antar ASN dengan Pegawai Swasta	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
	b. Penyesuaian Ijazah	1 Tahun Sejak Berakhirnya Masa Tahun Anggaran	1 Tahun	Musnah
	c. Penyusunan Sistem Karier			
	d. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	e. Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
5.	Kinerja Aparatur Sipil Negara			
	a. Hasil Penilaian Kinerja dan Standar kerja			
	b. Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja			
	c. Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja			
6.	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN			
	a. Kode Etik Pegawai			
	b. Disiplin			

10/10/2024

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
c.	Pemberhentian Dengan Hormat	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
d.	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
e.	Pemberhentian Sementara	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
f.	Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
7.	Bantuan Hukum	2 Tahun Sejak Selesaiya Pertanggungjawaban Suatu Penugasan	3 Tahun	Musnah
8.	Status dan Kedudukan Pegawai	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Kedudukan Kepegawaian	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Keberatan Pegawai	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
9.	Sistem Informasi Kepegawaian			
	a. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	2 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
	d. Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	1 Tahun Sejak Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
10.	Pengawasan dan Pengendalian			
	a. Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	f. Berkas Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan Yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
11.	Administrasi Pegawai			
	a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	1 Tahun Sejak Selesaianya Pertanggungjawaban Suatu Penugasan	1 Tahun	Musnah
	b. Cuti Sakit	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Cuti Bersalin	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Cuti Tahunan	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Cuti Alasan Penting	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
f.	Cuti Besar	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
g.	Cuti Diluar Tanggungan Negara	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
h.	Karpeg/KPE/Karis/Karsu	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
i.	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
j.	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
k.	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
l.	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
m.	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ Tunjangan	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
11.	Kesejahteraan Pegawai			
a.	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
b.	Asuransi Pegawai/BPJS	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
c.	Tabungan Perumahan	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
d.	Bantuan Sosial	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
e.	Pakaian Dinas	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
f.	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
g.	Pemberian Tali Kasih	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
h.	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
i.	Olahraga dan Rekreasi	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
j.	Rekam Medis	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
12.	Administrasi Perseorangan			
a.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Tahun Setelah Penetapan Pensiun	7 Tahun	Musnah
b.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3 Tahun Setelah Penetapan Pensiun	7 Tahun	Musnah
c.	Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Yang Disetarakan	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Sekretaris Daerah	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen
	e. ASN Berjasa/Terlibat Dalam Peristiwa Berskala Nasional	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen
13.	Penilaian Kompetensi			
	a. Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Hasil Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
B.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	1. Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Pendidikan dan Pelatihan	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	a. Sistem Informasi Program dan Pembinaan Diklat			
	b. Pedoman-Pedoman Kediklatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Kurikulum-Kurikulum Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Modul-Modul Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Panduan Fasilitator	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. Saran/Rekomendasi Penyelegaraan Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Notulen Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	h. Monitoring dan Evaluasi Program dan Pembinaan Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Widyaiswara			
	a. Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	
	b. Sertifikasi Widyaiswara	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	c. Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Penilaian Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	4. Penyelenggaraan Diklat			
	a. Perencanaan, Peserta, Pengajar, Penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran	2 Tahun		
	e. Sistem Informasi Diklat	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	f. Monitoring Penyelenggara Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Alumni	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
X.	KEUANGAN			
	A. KEUANGAN DAERAH			
	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APPD-P)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2.	Penyusunan Anggaran			
	a. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD Yang Telah Disetujui Sekretaris Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tang Telah Disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	Pelaksanaan Anggaran			
	a. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D); UP, GU, TU, LS	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	b. Pendapatan	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah

4/1/2018

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
c.	Belanja	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
d.	Pembentukan Daerah	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
e.	Dokumen Penatausahaan Keuangan	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
f.	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
g.	Daftar Gaji	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
h.	Kartu Gaji	1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
i.	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1.	j. Laporan Keuangan	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
4.	Pinjaman/Hibah Luar Negeri			Permanen
	a. Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	1 Tahun Setelah Diterbitkan	3 Tahun	Permanen
	b. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membayai (<i>Green Book</i>)	1 Tahun Setelah <i>Loan Agreement</i> Ditandatangani	3 Tahun	Permanen
	c. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	1 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	d. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i> , Surat Menyurat dengan <i>Lender</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	e. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l : Usulan Luncuran Dana	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	f. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	g. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
	h. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Musnah	
i.	<i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : <i>No Objection Letter</i> (NOL), <i>Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization</i> (WA)	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen	
j.	<i>Staff Appraisal Report</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen	
k.	<i>Report / Laporan</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen	
l.	<i>Laporan Hutang Daerah</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen	
m.	<i>Completion Report/ Annual Report</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen	
n.	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1 Tahun Setelah Diperbarui	1 Tahun	Permanen	
5.	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	1 Tahun Setelah Ada Pejabat Pengganti	1 Tahun	Permanen	
6.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	1 Tahun Selama Belum Ada Perubahan	1 Tahun	Permanen	
	a. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Dokumen Kebijakan Akuntansi	1 Tahun Selama Belum Ada Perubahan	1 Tahun	Permanen
	c. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	d. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulan/Semesteran	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
7.	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	a. Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	b. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan Lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPP, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/ Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	c. Buku Rekening Bank	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
d.	Keputusan Pembukuan Rekening	1 Tahun Selama Rekening Masih Aktif	1 Tahun	Permanen
e.	Pembukuan Anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (Bku), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran	3 Tahun Selama Rekening Masih Aktif	7 tahun	Musnah
8.	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
a.	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
b.	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
9.	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD, antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD			
10.	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	a. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu			
	b. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	c. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro, Berkas Penyaluran Biaya Pemilu Termasuk Diantaranya Bukti Transfer Bank	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	d. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu Termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 Tahun Sejak Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
11.	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah			
	a. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen

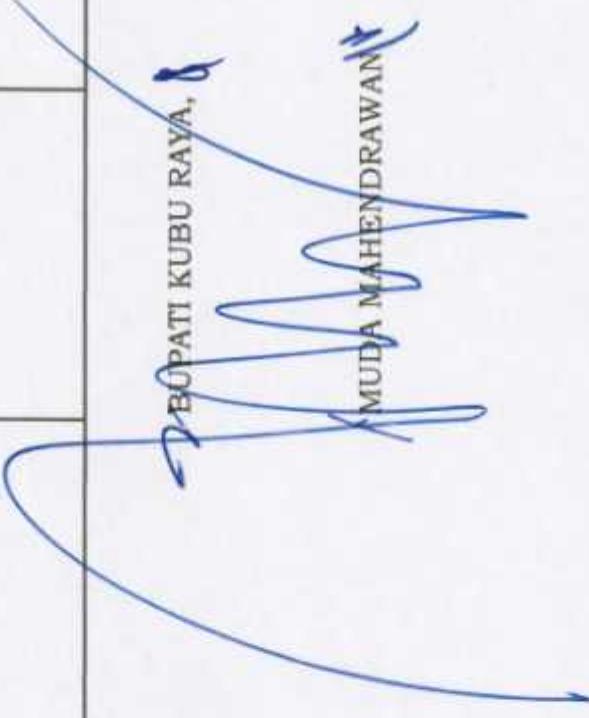
NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
	c. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
	d. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	2 Tahun Setelah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Dilunasi	3 Tahun	Dinilai Kembali
12.	Anggaran Daerah			
	a. Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
13.	Pendapatan dan Investasi Daerah			
	a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Standardisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Analisis dan Evaluasi, Pemantauan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Fasilitasi Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b. Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis di Bidang Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan, Dasilitas Serta Bimbingan Teknis di Bidang Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Non Keuangan, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	c. Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, Standardisasi Teknis, Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan, Standardisasi Teknis, Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d. Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis Pengelolaan Kekayaan, Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis Investasi Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kekayaan dan Investasi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	e. Pinjam dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Obligasi Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Dana Bergulir Yang Bersumber Dari APBN, Bimbingan Teknis Obligasi Daerah, Dana Bergulir Serta Penyertaan Modal Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah, Obligasi Daerah, dan Dana Bergulir, dan Penyertaan Modal Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
14.	Fasilitasi Dana Perimbangan			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Penghitungan, dan Rekonsiliasi Dana Alokasi Umum, Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Umum, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Umum	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar, Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Khusus, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dana Alokasi Khusus	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Perhitungan, dan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Sosialisasi dan Supervisi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan Supervisi Dana Otonomi Khusus, Sosialisasi dan Supervisi dan Transfer Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan , antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan dan Perimbangan, Penyiapan Dukungan Teknis Dana Perimbangan, Penyiapan Data dan Informasi Untuk Penyusunan Laporan Dana Perimbangan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
15.	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah			
	a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis di Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1 Tahun	2 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: Penyiapan Bahan Bantuan Keterangan Ahli di Bidang Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Penyiapan Data dan Informasi Untuk Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



BUPATI KUBU RAYA,



MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 07 September 2023,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 40.....